

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA  
INTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**OLEH:  
Sartika  
(222015228)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA  
INTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Sartika  
Nim : 222015228**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan  
Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi  
Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim  
Nama : Sartika  
NIM : 222015022  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Manajemen

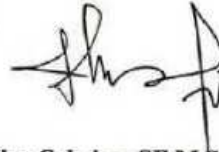
Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal,.....2019

Pembimbing I



**Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II



**Nina Sabrina, SE.M.Si.**  
NIDN/NBM: 0216056801/851119

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin, SE., Ak., M.Si., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sartika  
Nim : 222015228  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 2 Agustus 2019  
Penulis,

  
Sartika

## **ABSTRAK**

**Sartika/222015228/2019/ Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim**

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan internal terhadap kinerja intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat dua variabel independen yaitu akuntansi sektor publik ( $X_1$ ) dan pengawasan internal ( $X_2$ ), serta satu variabel dependen yaitu kinerja intansi pemerintah. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bidang administrasi keuangan dan aset yang berjumlah 32 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik analisis data menggunakan deskriptif regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah; (2) Tidak terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah; dan (3) Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, yang dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis dimana signifikansi  $0,00 < 0,05$ , dengan pengaruh sebesar 45,80% dan selebihnya 54,20% dipengaruhi faktor lainnya.

**Kata Kunci: akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja intansi pemerintah**

## PRAKATA



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim” tepat pada waktunya, yang meghasilkan terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Penulis mengucapkan terima kepada kedua orang tuaku, Ayah Sarbeni dan Ibu Noprianti yang telah mendidik dan membesarkanku. Selain itu juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku pembimbing yang telah meluangkan

waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak DR. M. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Para Dosen Pengasuh dan Karyawan serta seluruh Civitas Akademika yang telah mendidik kami selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi dan ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Aprianto, SE.,M.Si., selaku Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pemerintah Kabupaten Muara Enim, yang telah memberikan izin penelitian, serta pegawai bidang administrasi keuangan dan aset yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
8. Almamaterku.

Semoga Allah SWT, berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya.

*Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarokatu.*

Palembang, Juli 2019  
Penulis,

Sartika



## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i       |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....  | ii      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....  | iii     |
| <b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....  | iv      |
| <b>HALAMAN PRAKATA</b> .....   | v       |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....  | viii    |
| <b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....  | xi      |
| <b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....   | xii     |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | xiii    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | xiv     |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | xv      |
| <br>   |         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |         |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....   | 9       |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 9       |
| D. Manfaat Penelitian .....  | 10      |
| <br>   |         |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,<br/>DAN HIPOTESIS</b>  |         |
| A. Landasan Teori .....  | 11      |
| 1. Akuntansi Sektor Publik .....   | 11      |
| 2. Pengawasan Internal .....   | 21      |
| 3. Kinerja Instansi Pemerintah .....   | 26      |
| 4. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap<br>Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten<br>Muara Enim ..... | 31      |
| 5. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Intansi<br>Pemerintah Daerah .....  | 32      |

|   |    |
|---|----|
| B. Penelitian Sebelumnya .....  | 33 |
| C. Kerangka Pemikiran .....   | 35 |
| D. Hipotesis .....  | 35 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>  |    |
| A. Jenis Penelitian .....   | 37 |
| B. Lokasi Penelitian .....  | 39 |
| C. Operasional Variabel .....   | 40 |
| D. Data yang Digunakan .....  | 41 |
| E. Populasi dan Sampel .....  | 42 |
| 1. Populasi .....   | 42 |
| 2. Sampel .....   | 42 |
| F. Metode Pengumpulan Data .....  | 44 |
| G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data .....   | 45 |
| 1. Analisis Data .....  | 45 |
| 2. Teknik Analisis Data .....   | 47 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Hasil Penelitian .....   | 52 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....  | 52 |
| 2. Struktur Organisasi .....  | 58 |
| 3. Skor Ordinal dan Skor Interval Jawaban Responden .....   | 58 |
| 4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....  | 61 |
| 5. Akuntansi Sektor Publik .....  | 73 |
| 6. Pengawasan Internal .....  | 74 |
| 7. Kinerja Instansi Pemerintah .....  | 75 |
| 8. Analisis Data .....  | 77 |
| B. Pembahasan .....   | 86 |
| 1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap<br>Kinerja Instansi Pemerintah Daerah .....                  | 86 |
| 2. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja<br>Instansi Pemerintah Daerah .....                                | 87 |
| 3. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan<br>Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah ..... | 89 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> |           |
| A. Simpulan .....               | 90        |
| B. Saran .....                  | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>     | <b>92</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>           | <b>94</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik ditujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat

ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan kepala pemerintah.

Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan revidi dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas dalam instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut

pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan

pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Sedangkan Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembukuan (akuntansi).

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pengawasan Intern berarti pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasan intern dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance*. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara intern yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan kebijakan yang berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi dari kegiatan operasional, keandalan laporan keuangan di sektor pemerintahan, serta ketaatan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Bambang (2012), Putri (2015), Intan (2015) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Astari (2015) menyimpulkan bahwa



penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Ira (2014), dan Nirmalasari (2018) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Dewi (2017) menyimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang secara geografis terletak pada posisi antara 4° sampai 6° Lintang Selatan dan 104° sampai 106° Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.300.50 Km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan, 245 desa definitif atau persiapan dan 10 Kelurahan. Kabupaten Muara Enim. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/128/AA.05/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat nilai 70,01, dengan rincian penilaian seperti pada tabel berikut.

**Tabel I.1**  
**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2017-2018**

| Komponen yang Dinilai         | Nilai |       |       | Keterangan |
|-------------------------------|-------|-------|-------|------------|
|                               | Bobot | 2017  | 2018  |            |
| a. Perencanaan kinerja        | 30    | 23,33 | 22,91 | -0,42      |
| b. Pengukuran kinerja         | 25    | 16,46 | 18,31 | 1,85       |
| c. Pelaporan kinerja          | 15    | 11,06 | 12,84 | 1,78       |
| d. Evaluasi kinerja           | 10    | 6,68  | 8,11  | 1,43       |
| e. Capaian kinerja            | 20    | 12,48 | 12,90 | 0,42       |
| Nilai Hasil Evaluasi          | 100   | 70,01 | 75,07 | 5,06       |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja |       | BB    | BB    | -          |

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, 2019

Berdasarkan tabel I.1, dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara umum mengalami peningkatan. Namun, salah satu komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja menurun. Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III, IV, dan individu pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.
3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *output* dan *outcome* secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.

4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana *monitoring* dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, sehingga mampu menyujutkan efektivitas program kinerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi.
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja OPD yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
6. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD, serta kepada Bappeda dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
7. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
8. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP). Pengawasan intern di Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Muara Enim. Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan perbedaan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

2. Bagi Intansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah.

3. Bagi Almamater

Menambah perbendaharaan kepustakaan. Tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Akuntansi Sektor Publik**

###### **a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Haryanto, dkk. (2017: 1) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya. Lebih lanjut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Biduri (2018: 2) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi

ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

#### **b. Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik**

Organisasi-organisasi sektor publik sering dijumpai dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang cenderung berurusan dengan instansi pemerintah, seperti departemen pendidikan, departemen tenaga kerja, kantor pencatatan sipil, atau kepolisian. Selain itu juga, seseorang berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, dijumpai beragam organisasi sektor publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan, dan yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang. Biduri (2018: 3) menyatakan bahwa jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

### 1) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

- a) Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: (1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; seta (2) Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.
- b) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

### 2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya: (a) Perguruan tinggi BHMN; (b) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan (c) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### 3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.



Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompet Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

**c. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

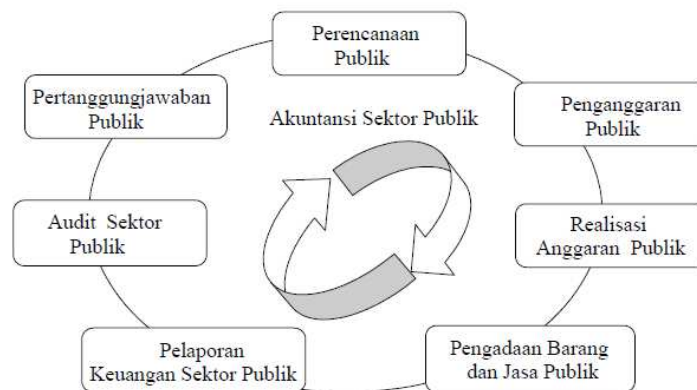
Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018: 5) antara lain:

- 1) Faktor ekonomi meliputi antara lain:
  - a) Pertumbuhan ekonomi
  - b) Tingkat inflasi
  - c) Tenaga kerja
  - d) Nilai tukar mata uang
  - e) Infrastruktur
  - f) Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
- 2) Faktor politik meliputi antara lain:
  - a) Hubungan negara dan masyarakat
  - b) Legitimasi pemerintah
  - c) Tipe rezim yang berkuasa
  - d) Ideologi negara
  - e) Elit politik dan massa
  - f) Jaringan internasional

- g) Kelembagaan
- 3) Faktor kultural meliputi antara lain:
  - a) Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
  - b) Sistem nilai di masyarakat
  - c) Historis
  - d) Sosiologi masyarakat
  - e) Karakteristik masyarakat
  - f) Tingkat pendidikan
- 4) Faktor demografi meliputi antara lain:
  - a) Pertumbuhan penduduk
  - b) Struktur usia penduduk
  - c) Migrasi
  - d) Tingkat kesehatan

#### d. Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2014: 12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik dapat digambarkan dalam rangkaian siklus pada gambar berikut.



Gambar II.1. Siklus Akuntansi Sektor Publik  
(Bastian, 2014: 12)

Gambar siklus akuntansi sektor publik di atas, terlihat bahwa akuntansi sektor publik memiliki elemen-elemen sebagai berikut.

#### 1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi.

Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut dilakukan dengan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Maka, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada karena hakikat dan tujuan publik adalah kesejahteraan publik. Otomatis, tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis. Dapat diartikan bahwa perencanaan publik menjadi ilmu yang mempunyai karakter tersendiri. Berkaitan dengan itu, topik dilanjutkan dengan penganggaran publik.

## 2) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara.

Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Tidak hanya itu, kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh kebijakan keuangan secara menyeluruh yang ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi, dukungan politis berbagai lembaga, dan akurasi perencanaan, terutama penganggaran yang dipengaruhi teknik *review* perkiraan anggaran. Topik selanjutnya adalah realisasi anggaran publik.

## 3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang

telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

Perlu diketahui, realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri atas kegiatan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Siklus tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa publik

#### 4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

#### 5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Selanjutnya, perlu diketahui beberapa komponen laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas yang dilengkapi catatan atas laporan

keuangan, ataupun laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan *prospektus*.

#### 6) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

Dikaji dari perspektif proses, audit berhubungan erat dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh berbagai organisasi sektor publik dan pemerintahan. Pihak-pihak tertentu, sebagai contoh auditor dan pengawas, wajib memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pemeriksaan yang memang terlebih dahulu diprioritaskan, apa lagi pada pemahaman tentang sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik. Agar pemeriksaan berjalan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami

bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait audit yang akan dilakukan oleh auditor.

#### 7) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

#### e. Indikator Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2014: 19) siklus akuntansi keuangan sektor publik antara lain:

- 1) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Transaksi yang dimaksud dalam hal ini adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan.
- 2) Analisis bukti transaksi, setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti inilah yang kemudian akan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.
- 3) Pencatatan data transaksi, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas bukti transaksi yang telah terjadi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

- 4) Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.
- 5) Pelaporan, selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian. Berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor public yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

## **2. Pengawasan Internal**

### **a. Pengertian Pengawasan Internal**

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2016: 133).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



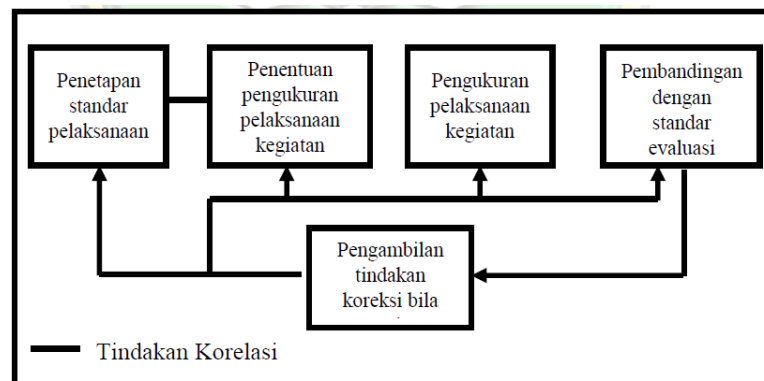
Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013: 172) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## b. Tahap-tahap Proses Pengawasan Internal

Reksohadiprodo (2002: 63) menjelaskan bahwa pertama kali orang harus menentukan standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, dan hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan. Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebabnya itu datang dari luar, ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses pengawasan internal.



Gambar II.2. Tahapan Proses Pengawasan Internal  
(Handoko, 2013: 363)

### 1) Tahap 1: Penetapan standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan

pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kouta dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

2) Tahap 2: Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3) Tahap 3: Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem *monitoring* ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus.

4) Tahap 4: Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

5) Tahap 5: Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam

berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Jelasnya, pengawasan internal memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar kerja adalah ukuran yang menjadi dasar untuk melakukan pekerjaan
- 2) Penilaian kerja adalah upaya untuk menilai pekerjaan yang dilakukan atasan terhadap hasil pekerjaan karyawan
- 3) Mengoreksi pekerjaan adalah membandingkan hasil pekerjaan dengan standar kerja yang ditentukan sebelumnya.

#### **c. Indikator Pengawasan Internal**

Swayer's (2005: 49) menyebutkan beberapa sarana oprasional yang dapat digunakan *manager* untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah:

- 1) Organisasi (*organization*), organisasi sebagai sarana kontrol, merupakan struktur peran yang dituju untuk orang-orang di dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan ekonomis.
- 2) Kebijakan (*policy*), suatu kebijakan adalah pernyataan prinsip yang dibutuhkan, menjadi pedoman atau membatasi tindakan.
- 3) Prosedur (*procedure*), merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Personalia (*personnel*), Orang-orang yang diperkerjakan atau ditugaskan harus memiliki kualifikasi untuk melakukan tugas yang

diberikan. Bentuk kontrol yang baik disamping kinerja masing-masing individu adalah *supervise*. Jadi, standar *supervise* harus ditetapkan.

- 5) Akuntansi (*accounting*), merupakan sarana yang sangat penting untuk kontrol keuangan pada aktivitas dan sumber daya.
- 6) Penganggaran (*budgeting*), merupakan suatu pernyataan hasil-hasil yang diharapkan dinyatakan dalam bentuk numerik. Sebagai sebuah kontrol, anggaran menetapkan standar masukan sumber daya dan hal-hal yang harus dicapai sebagai keluaran.
- 7) Pelaporan, kebanyakan organisasi, manajemen berfungsi membuat keputusan berdasarkan laporan yang diterima. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis.

### **3. Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **a. Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah**

Istilah kinerja berasal dari *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2015: 67).

Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015: 151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

#### **b. Manfaat Kinerja Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2009: 7) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang Memberikan telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

**c. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah**

Biduri (2018: 139) menyatakan bahwa indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Mardiasmo dikutip (Biduri, 2018: 139) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud sebagai berikut.

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

#### **d. Indikator Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Mardiasmo (2009: 21), *value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Lebih lanjut Haryanto, dkk. (2017: 18) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik. *Value For money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

- 1) Ekonomi: pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat



meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

- 2) Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- 3) Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

*Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan

pelaksanaan *good gayer-liance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntansi sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

- 1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik;
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*;
- 4) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik;
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

#### **4. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim**

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya

dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017:1).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

## **5. Pengaruh Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim**

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan

tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Manfaat yang utama diperoleh dari pengawasan intern yaitu membantu suatu organisasi dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Dapat membantu menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang dapat dipercaya, dan dapat memastikan suatu organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan, terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya dapat pula membantu mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan terhindar dari hal yang merugikan. Sedangkan tujuan diadakannya pengawasan internal adalah untuk mencapai tingkatan kinerja yang telah direncanakan, menjamin susunana birokrasi yang baik dalam operasi unit-unit pemerintahan daerah baik secara internal maupun eksternal untuk memperoleh perpaduan yang maksimum dalam pengelolaan pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan publik dari penyalahgunaan wewenang; serta mengendalikan agar administrasi pemerintah dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan apratur pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim.

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut.

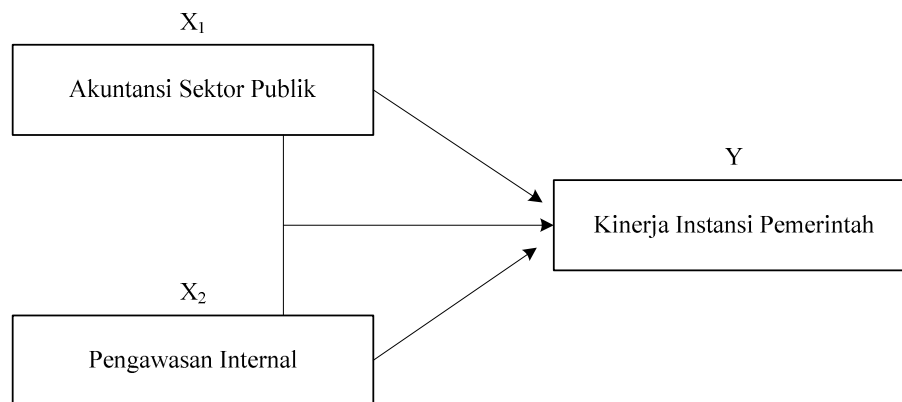
**Tabel II.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya**

| No | Nama/Tahun/Judul   | Hasil Penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Bambang / 2012/ Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik dan penerapan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.</li> <li>2. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah baik secara parsial maupun simultan.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntansi sektor publik</li> <li>2. Pengawasan ternal</li> <li>3. Kinerja instansi pemerintah</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan.</li> <li>2. Bupati/Walikota, wakilnya, beserta staf Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan dan pejabat eselon III dan IV dibawahannya</li> </ol> |
| 2. | Putri / 2015/ Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 32,6% dan pengaruh tidak langsung akuntansi akibat adanya hubungan pengawasan internal sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya 44,8%.</li> <li>2. Pengawasan internal memberikan pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah sebesar 7,9%, dan pengaruh tidak langsung sebesar 12,2% maka besar pengaruhnya adalah 20,1%.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntansi sektor publik</li> <li>2. Pengawasan internal</li> <li>3. Kinerja instansi pemerintah</li> </ol> | Pegawai yang ditempatkan di Sub bagian keuangan, Sub kepegawaian, Sub perencanaan, Sub SDM (Sumber daya manusia) dan Sub bagian Anggaran yang ada pada Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat   |
| 3. | Intan / 2015/ Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov) | Variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntansi sektor publik</li> <li>2. Pengawasan</li> <li>3. Kinerja instansi pemerintah</li> </ol>          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas laporan keuangan</li> <li>2. Dispenda Prov, Dispenda Kota, dan Dishub Prov Sumatera Selatan.</li> </ol>  |

|    |   |   |                     |   |
|----|---|---|---------------------|---|
| 4. | Dewi / 2015/ Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> <li>3. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</li> </ol> | Pengawasan internal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem akuntansi keuangan daerah</li> <li>2. Pengelolaan keuangan daerah</li> <li>3. Kinerja keuangan</li> <li>4. DPPKAD Kabupaten Karanganyar</li> </ol> |
|----|---|---|---------------------|---|

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



**Gambar II.3. Kerangka Pemikiran**  
(Peneliti, 2019)

### D. Hipotesis

1. H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.

2. H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.
3. H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Sebagaimana yang dikemukakan Masyhuri dan Zainuddin (2014: 54) jenis-jenis penelitian diantaranya adalah:

1. Penelitian pengembangan (*development research*)

Penelitian yang bermaksud menyelidiki pertumbuhan atau perubahan sesuatu sebagai fungsi waktu. Kalau penelitian itu bermaksud mengembangkan penemuan-penemuan penelitian sebelumnya, baik untuk keperluan ilmu murni maupun ilmu terapan dan sebagainya, maka hal tersebut dinyatakan sebagai penelitian.

2. Penelitian korelasi (*correlation research*)

Penelitian yang bermaksud mendeteksi sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya.

3. Penelitian dasar (*basic research* atau *pure research*)

Riset untuk mengembangkan dan mengevaluasi suatu konsep atau teori yang bertujuan untuk memperluas batas-batas ilmu pengetahuan. Riset ini tidak menunjukkan secara langsung untuk mendapatkan pemecahan bagi sebuah permasalahan yang spesifik.

4. Penelitian eksplorasi

Penelitian yang ‘masalah (*problem*)’ belum pernah dijejaki, belum pernah diteliti orang lain. Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah masih mencari-



cari akar, meskipun peneliti dalam kondisi 'kegelapan' masalah, tetapi ia tetap berusaha menemukan permasalahan yang sedang atau akan diteliti tersebut.

5. Penelitian longitudinal

Penelitian yang memerlukan waktu cukup lama, seperti penelitian peneliti ingin mengetahui perkembangan kemampuan berpikir anak sekolah dasar kelas I sampai dengan kelas IV, maka peneliti mulai mencatat kemampuan berpikir sejak anak duduk di kelas I.

6. Penelitian *cross-sectional*

Penelitian yang tidak menggunakan sasaran penelitian yang sama. Dalam waktu yang bersamaan, peneliti mengadakan pencatatan tentang perkembangan berpikir anak-anak sekolah dasar secara serentak.

7. Penelitian *survey*

Penelitian yang hampir tumpang tindih pengertian mengartikan sama dengan penelitian kuantitatif. Bahkan keduanya diartikan sama karena sifatnya, akan tetapi biasanya penelitian *survey* hanya menggunakan kuesioner dan hanya berkisar pada ruang lingkup: (i) ciri-ciri demografis masyarakat; (ii) lingkungan sosial mereka; (iii) aktivitas mereka; dan (iv) pendapatan dan sikap mereka.

8. Penelitian studi kasus

Penelitian yang hampir memiliki persamaan dengan penelitian *grounded* yaitu sama-sama berorientasi kualitatif. Namun dalam hubungan dengan bentuk-bentuk penelitian lainnya, misalnya *survey* atau kuantitatif, studi besar ruang

lingkup penelitian tersebut. Studi kasus biasanya digunakan dalam studi antropologi.

#### 9. Penelitian *assesment*

Penelitian sebagai suatu pendekatan, *assesment* telah berkembang menjadi banyak penelitian yang menarik, terutama pada nilainya suatu proyek. Hal yang menonjol dari penelitian *assesment* adalah keterlibatan peneliti mulai dari awal pelaksanaan proyek sampai selesai. Kredibilitas peneliti *assesment* dituntut seperti yang ada pada penelitian *grounded*.

#### 10. Penelitian evaluasi

Penelitian identik dengan penelitian *assesment*. Akan tetapi, jika dilihat dari cara kerjasama dan keterlibatan peneliti masing-masing, ditemukan perbedaannya. Pada penelitian evaluasi, keterlibatan peneliti mulai dari awal pelaksanaan proyek sampai akhir, tidak merupakan kebutuhan.

#### 11. Penelitian kancing

Bentuk penelitian yang sering dilaksanakan pada berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kancing adalah laboratorium raksasa yang penuh dengan seribu satu masalah yang tak kunjung pangkal habisnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai beberapa jenis penelitian di atas, maka jenis penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah korelasi, karena dalam penelitian ini untuk mendeteksi sejauhmana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang terletak di Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311

Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian ini digunakan peneliti sebagai bahan penelitian skripsi untuk mendapatkan data, informasi, keterangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan peneliti.

### C. Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini perlu ditafsirkan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat ditafsirkan dengan operasionalisasi variabel, yaitu: akuntansi sektor publik, pengawasan internal, dan kinerja instansi pemerintah. Operasional variabel dalam dapat dilihat pada tabel III.1 berikut.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel                          | Definisi variabel   | Indikator   | Skala Ukur |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| Akuntansi sektor publik ( $X_1$ ) | Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014) | 1. Analisis bukti transaksi.<br>2. Pencatatan data transaksi.<br>3. Pengikhtisaran.<br>4. Pelaporan | Ordinal    |
| Pengawasan internal ( $X_2$ )     | Pengawasan berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan  | 1. Organisasi.<br>2. Kebijakan<br>3. Prosedur<br>4. Penganggaran                                    | Ordinal    |

|                                |  |  |         |
|--------------------------------|--|--|---------|
|                                | keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan (Swayer's, 2005).   |  |         |
| Kinerja intansi pemerintah (Y) | Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 2008). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomis (cermat dalam enggunaan dan alokasi sumber daya).</li> <li>2. Efisiensi (penggunaan sumber daya)</li> <li>3. Efektivitas (pencapaian tujuan)</li> </ol> | Ordinal |

(Sumber: Peneliti, 2019)

#### **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Susetyo (2017: 12), data adalah bentuk jamak dari *datum* yang berarti banyak. Data merupakan kumpulan fakta, keterangan, atau angka-angka yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Lebih lanjut Sanusi (2011: 146) mengelompokkan data dalam dua jenis, yaitu data primer dan dan sekunder. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara). Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat melalui orang lain). Dengan demikian, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil penyebaran kuisisioner terhadap responden. Sedangkan data

sekunder diperoleh melalui tulisan, artikel, jurnal atau makalah kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2018: 119), populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang berjumlah 183 orang. Jelasnya rincian populasi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel III.2**  
**Populasi Penelitian**

| No.           | Bidang                          | Jumlah     |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 1             | Organisasi                      | 10         |
| 2             | Tapem                           | 23         |
| 3             | Umum                            | 22         |
| 4             | Pembangunan                     | 6          |
| 5             | Layanan Pengadaan Barang & Jasa | 20         |
| 6             | Hukum                           | 10         |
| 7             | Humas                           | 29         |
| 8             | Administrasi Keuangan & Aset    | 32         |
| 9             | Perekonomian dan SDA            | 8          |
| 10            | Kesra                           | 10         |
| 11            | Sekda dan Asisten               | 4          |
| 12            | Staf Ahli                       | 3          |
| 13            | Staf Pembantu Staf Ahli         | 6          |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>183</b> |

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, 2019

### 2. Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018: 120). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*,

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *sampling* sistematis, kuota, *aksidental*, *puprosive*, jenuh dan *snowball* (Sugiyono, 2018: 123). Teknik *non prability sampling* yang dipilih adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian diantaranya adalah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, berkompeten dalam administrasi keuangan, serta mampu menyusun akuntansi sektor publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pegawai bidang administrasi keuangan dan aset yang berjumlah 32 orang. Jelasnya sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel III.3 berikut.

**Tabel III.3**  
**Sampel Penelitian**

| No.           | Bidang                          | Jumlah    |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 1             | Organisasi                      | 3         |
| 2             | Tapem                           | 2         |
| 3             | Umum                            | 2         |
| 4             | Pembangunan                     | 2         |
| 5             | Layanan Pengadaan Barang & Jasa | 3         |
| 6             | Hukum                           | 2         |
| 7             | Humas                           | 3         |
| 8             | Administrasi Keuangan & Aset    | 4         |
| 9             | Perekonomian dan SDA            | 3         |
| 10            | Kesra                           | 2         |
| 11            | Sekda dan Asisten               | 2         |
| 12            | Staf Ahli                       | 2         |
| 13            | Staf Pembantu Staf Ahli         | 2         |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>32</b> |

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, 2019

## F. Metode Pengumpulan Data

Hartono (2017: 109) menjelaskan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut.

### 1. Observasi

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pendekatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendapatkan data primer adalah pendekatan komunikasi (*communication approach*).

### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, wawancara intersep, dan wawancara telepon.

### 3. Eksperimen

Studi yang melibatkan keterlibatan peneliti memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan mengobservasi efeknya.

### 4. Survei

Metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Survei dapat dikelompokkan ke dalam *mail survey*, *computer-delivered survey* dan *intercept studies*.

### 5. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.

## 6. Dokumentasi

Dokumentasi, dari menurut asal katanya dokumen, memiliki pengertian barang-barang tertulis. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Berdasarkan jenis-jenis metode pengumpulan di atas, metode pengumpulan data yang digunakan dalam ini adalah kuisioner, dan dokumentasi.

## **G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Data**

Menurut Muhidin dan Maman (2017: 52), analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Data dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif menurut Sunyoto (2016: 26) adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solution* (SPSS), karena dengan program tersebut analisis dapat dilakukan dengan cepat, dan menghasilkan *output* lebih akurat.

Menurut Sugiyono (2011: 182), analisis data terdiri dari (i) analisis kuantitatif, merupakan metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar; dan (ii) analisis kuantitatif, merupakan metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang



digunakan. Berdasarkan pendapat tersebut, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif.

Pengukuran suatu instrumen angket (kuisisioner) dapat menggunakan berbagai skala. Menurut Hartono (2017: 82) skala yang digunakan untuk mengukur kuisisioner adalah skala *rating*. Skala *rating* terdiri dari 8 macam, yaitu:

- a. Skala dikotomi
- b. Skala kategori
- c. Skala *likert*
- d. Skala perbedaan semantik
- e. Skala numerik
- f. Skala penjumlahan tetap atau konstan
- g. Skala stapel
- h. Skala grafik

Berdasarkan macam-macam skala di atas, skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Adapun penskoran skala likert dapat dilihat pada Tabel III.4 berikut.

**Tabel III.4**  
**Penskoran Jawaban Kuisisioner dengan Skala *Likert***

| Pernyataan Positif        |   | Pernyataan Negatif        |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Sangat Setuju (SS)        | 5 | Sangat Setuju (SS)        | 1 |
| Setuju (S)                | 4 | Setuju (S)                | 2 |
| Netral (N)                | 3 | Netral (N)                | 3 |
| Tidak Setuju (TS)         | 2 | Tidak Setuju (TS)         | 4 |
| Sangat Tidak Setuju (STS) | 1 | Sangat Tidak Setuju (STS) | 5 |

(Sumber: Riduwan, 2012: 39)

## 2. Teknik Analisis Data

### a. Uji Validitas

Suatu instrumen dikatakan valid jika instrument dapat mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur (Muhidin dan Maman, 2017: 30). Instrumen dinyatakan memiliki validitas apabila instrumen tersebut telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Artinya apabila instrument yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen atau instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada, maka secara logis sudah valid. Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan bantuan program komputer, salah satu diantaranya program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Untuk menafsirkan hasil uji validitas, kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika nilai  $r$  hitung lebih besar ( $>$ ) dari nilai  $r$  tabel maka item angket (kuisisioner) dinyatakan valid dan dapat dipergunakan, atau
- 2) Jika nilai  $r$  hitung lebih kecil ( $<$ ) dari nilai  $r$  tabel maka item angket dinyatakan valid dan tidak dapat dipergunakan.

Nilai  $r$  tabel dapat dilihat pada  $\alpha = 5\%$  dan  $db = n - k$ .

### b. Uji Reliabilitas

Suatu instrumen pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi, uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. (Muhidin dan

Maman, 2017: 37). Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek (homogen) diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah dalam hal ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil diantara hasil beberapa kali pengukuran. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan bantuan program komputer, yaitu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ .

c. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi linier berganda dalam penggunaannya harus memenuhi uji asumsi klasik yang ditetapkan, agar dapat menghasilkan nilai-nilai koefisien sebagai penduga yang tidak bias. Dalam uji asumsi klasik terdapat 4 (empat) analisis, diantaranya adalah:

1) Heteroskedastisitas

Sujarweni (2017:232) menyatakan bahwa uji heterokedasitas digunakan untuk mengetahui perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedasitas pada suatu modal dapat dilihat dengan pola gambar *Scatterplot* dengan kriteria: (i) titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0; (ii) titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja; (iii)

penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang; dan (iv) penyebaran titik-titik data tidak berpola.

## 2) Normalitas

Menurut Sujarweni (2017: 68), bahwa uji normalitas dapat digunakan untuk mengetahui apakah data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Data penelitian yang baik dan layak dapat adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas data menggunakan program komputer SPSS dengan *analyze* Kolmogorov-Smirnow. Adapun kriteria pengujian:

- a) Jika  $sig > 0,05$  maka data distribusi data.
- b) Jika  $sig < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

## 3) Multikolinieritas

Sujarweni (2017: 230) menyatakan bahwa uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kesamaan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Kesamaan antar variabel independen cenderung mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu juga, dalam menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengujian multikolinieritas adalah jika VIF yang dihasilkan terletak antara 1-10 maka diidentifikasi tidak terjadi multikolinieritas.

## 4) Autokorelasi

Sujarweni (2017: 231) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan membandingkan nilai Durbin-Watson pada tabel Durbin Watson ( $d_l$  dan  $d_u$ ). Kriteria jika  $d_u < d_{hitung} < 4 - d_u$  maka diidentifikasi tidak terjadi autokorelasi.

## d. Analisis Regresi Linier Berganda

Muhidin dan Maman (2017: 187) menyatakan bahwa analisis regresi dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena yang kompleks. Jika  $X_1, X_2, \dots, X_i$  adalah variabel-variabel independen dan  $Y$  adalah variabel dependen, maka terdapat hubungan fungsional antara  $X$  dan  $Y$ , di mana variasi dari  $X$  akan diiringi pula oleh variasi dari  $Y$ .

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana. Kegunaannya, yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat ( $Y$ ) apabila variabel bebasnya ( $X$ ) dua atau lebih. Persamaan regresi ganda dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 \quad (\text{Muhidin dan Maman, 2017: 199})$$

Keterangan :

$Y$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

$a$  = Konstanta (nilai  $Y$  apabila  $X_1$  dan  $X_2 = 0$ )

$b$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

$X$  = Variabel independen

e. Analisis determinasi ( $R^2$ ), digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat (Riduwan, 2012: 228).

f. Pengujian hipotesis

1) Uji Koefisien Regresi Berganda Secara Simultan (Uji-F)

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh secara menyeluruh variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$ . Kriteria pengambilan keputusan adalah: (i) jika  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima; dan (ii) jika  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (Sujarweni, 2017:115)

2) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y$  dan variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y$ . Kriteria pengambilan keputusan adalah: (i) jika  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima; dan (ii) jika  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  diterima (Sujarweni, 2017: 113)

## DAFTAR PUSTAKA

- A Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar P Mangkunegara. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Budi Susetyo. 2017. *Statistika untuk Analisis Data Penelitian: Dilengkapi Cara Perhitungan dengan SPSS dan MS Office Excel*. Bandung: Refika Aditama.
- Danang Sunyoto. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Refika Aditama, Bandung.
- Dittenhofer Sawyer. 2005. *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edi Sutrisno. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Indra Bastian. 2014. *Akuntansi Sektor Publik. In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Haryanto dan Sahmuddin serta Arifuddin. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto Hartono. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Maringan Masri Simbolon. 2013. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2014. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Malang: Refika Aditama.
- Muhammad Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta Rajawali Pers.
- Mulyadi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Bogor: In Media.

- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal.
- PerPres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Riduwan. 2012. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurrahman. 2017. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian: Dilengkapi Aplikasi Program SPSS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwenda Biduri. 2018. *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Sukanto Reksohadiprodjo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Suyadi Prawirosentono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.
- T. Hani Handoko. 2013. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- V. Wiratma Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- V. Wiratna Sujarweni. 2017. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yohannes Yahya. 2016. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.